

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 dan Nomor 33 Tahun 2004, membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk pertanggung jawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efektif dan efisien. Pemerintah daerah perlu melakukan penggolongan dana publik yang didasarkan pada konsep dasar *performance budgeting system* (anggaran kinerja). Sehubungan dengan hal tersebut maka penyelenggaraan pemerintah dipandang perlu untuk lebih menekankan prinsip-prinsip demokrasi diantaranya pemerataan keadilan dan memperhatikan potensi.

Dalam pengalokasian sumber dana agar menjadi lebih efektif dan efisien diperlukan adanya penganggaran. Penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Penganggaran terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap – tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Anggaran dapat terealisasi dengan baik apabila dalam penganggaran tersebut ada dukungan aktif dan pelaksana tingkat atas maupun tingkat bawah, hal ini menyangkut hubungan antara manusia dalam melaksanakan kegiatannya.

Mardiasmo (2009: 61) menyatakan Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Anggaran pada instansi pemerintah selain berfungsi sebagai alat perencanaan dan alat pengendalian juga berfungsi

sebagai instrumen akuntabilitas publik atas dasar pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai oleh uang publik. Penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan hasil dari dipergunakannya dana publik tersebut. Sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran mengenai kinerja instansi yang bersangkutan dalam penggunaan dana publik dan bisa dipertanggungjawabkan melalui media pelaporan yang dilaksanakan dalam waktu satu tahun anggaran.

Pelaksanaan anggaran berbasis kinerja diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dalam peraturan ini, disebutkan tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Adanya RKA-SKPD ini berarti telah terpenuhinya kebutuhan tentang anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas. Dimana anggaran berbasis kinerja menuntut adanya output optimal atau pengeluaran yang dialokasikan sehingga setiap pengeluaran harus berorientasi atau bersifat ekonomi, efisien, dan efektif serta sesuai dengan kinerja yang ingin capai. Dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya pengawasan melekat dan komitmen organisasi, agar pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dapat berjalan secara optimal.

Pengawasan pada hakekatnya merupakan fungsi yang melekat pada seorang leader atau top manajemen dalam setiap organisasi, sejalan dengan fungsi-fungsi dasar manajemen lainnya perencanaan dan pelaksanaan. Maksud pengawasan itu dalam rumusan yang sederhana adalah untuk memahami dan

menemukan apa yang salah demi perbaikan di masa mendatang. Sedangkan tujuan pengawasan itu adalah untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur Negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintah yang baik dan bersih (*good and clean government*).

Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung suatu organisasi atau unit kerja terhadap bawahan dengan tujuan untuk mengetahui atau menilai apakah program kerja yang ditetapkan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, 2009:137).

Dalam hal ini, pengawasan merupakan bagian dari pengendalian, adanya kelemahan pada pengawasan akan menghasilkan pelaksanaan dari realisasi anggaran berbasis kinerja yang tidak optimal. Pengawasan itu sendiri bertujuan untuk menjaga agar rencana itu dalam realisasinya tetap terarah pada tujuan yang telah ditentukan. Maka dari itu diperlukannya peningkatan pengawasan dalam setiap penyaluran kegiatan dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.

Selain pengawasan melekat, komitmen organisasi juga merupakan faktor yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Dalam kehidupan berorganisasi dibutuhkan suatu komitmen organisasi dalam setiap diri karyawannya. Komitmen organisasi adalah dorongan dari dalam individu untuk berbuat sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan sendiri (Weiner, 2004:619). Komitmen organisasi yang menjadi tolak ukur sejauh mana aparat pemerintah daerah memihak pada suatu

organisasi tertentu serta untuk mempertahankan keanggotaannya dalam suatu organisasi. Memberikan pekerjaan individu yang nilainya tidak selaras dengan nilai dalam organisasi yang ada, maka akan cenderung menghasilkan karyawan yang kurang memiliki motivasi dan komitmen, serta yang tidak terpuaskan oleh pekerjaan mereka dan organisasi yang kuat maka hal itu akan mempengaruhi aparat pemerintah daerah untuk bekerja keras dalam mencapai tujuan yang ditentukan. Selain mempengaruhi aparat pemerintah untuk bekerja keras dalam mencapai tujuan yang ditentukan, komitmen yang tinggi juga dapat menjadikan individu lebih mementingkan organisasi dari pada kepentingan pribadinya dan berusaha untuk membentuk organisasi yang diharapkan. Komitmen organisasi berkaitan dengan sikap seseorang yang berhubungan dengan organisasi tempat mereka bergabung. Sikap ini berkaitan dengan persepsi tujuan organisasi dan keterlibatannya dalam melaksanakan kerja. Apabila komitmen organisasi itu rendah maka akan membuat individu berbuat untuk kepentingan pribadinya. Namun dengan adanya komitmen organisasi yang tinggi maka secara tidak langsung juga akan meningkatkan kinerja tinggi.

Dengan diterapkannya anggaran berbasis kinerja pemerintah berharap anggaran digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas manajemen sektor publik. Dengan diterapkannya anggaran berbasis kinerja diharapkan anggaran yang disusun oleh pemerintah dapat diwujudkan dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Dalam pelaksanaannya anggaran ini harus diawasi, pengawasan melekat akan sulit diraih apabila komitmen dalam organisasi belum terlaksana dengan baik. Fungsi pengawasan terhadap komitmen dalam organisasi bertujuan untuk menilai dan mengawasi kualitas kerja karyawan terhadap tugas yang dijalankannya. Setiap organisasi memiliki tujuan untuk melaksanakan kinerja berdasarkan anggaran seoptimal mungkin, dan untuk mencapainya tidak lepas dari peranan pengawasan yang efektif dan komitmen dalam organisasi tersebut.

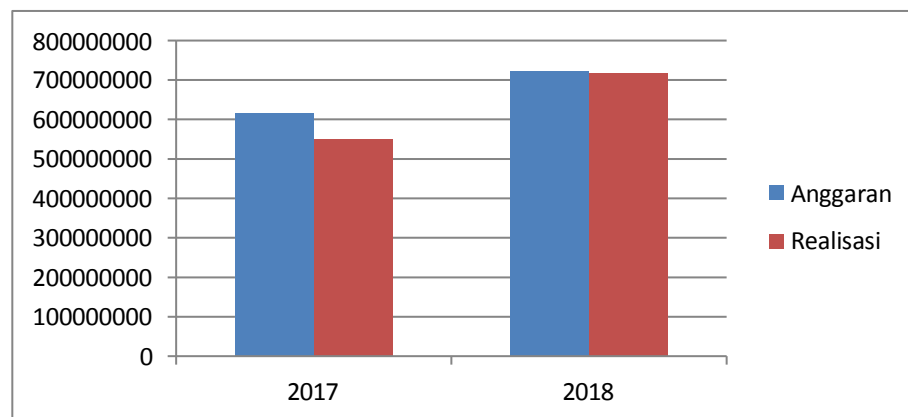
Untuk menciptakan pengawasan melekat dan sebuah komitmen organisasi, juga pentingnya perbaikan demi menciptakan sebuah kepercayaan positif terhadap kemajuan pemerintah itu sendiri. Keberhasilan dari sistem pengelolaan adalah tercapainya suatu implementasi atau pelaksanaan tujuan yang telah di rencanakan dan ditetapkan. Disini pelaksanaan anggaran berbasis kinerja merupakan tujuan dari tingkat keberhasilan yang diukur dari dua kategori yaitu pengawasan melekat dan komitmen organisasi.

Dinas atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya merupakan instansi – instansi atau perangkat daerah yang membantu Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam berbagai bidang Pemerintahan dan Kedinasan. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Dinas – Dinas atau Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai fungsi sebagai pelaksanaan, pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis terkait bidang yang dibawahinya setiap Dinas di Kabupaten Tasikmalaya.

Untuk mencapai pelaksanaan anggaran berbasis kinerja Pemerintah yang baik, Dinas atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dituntut

selalu melakukan pembenahan kinerja. Dalam pengkoordinasian dan pelaksanaan layanan, Dinas atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentulah berpedoman pada capaian tujuan dan sasaran kinerja dengan mempertimbangkan visi dan misi daerah dan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Nasional.

Berikut target dan realisasi anggaran yang dihasilkan oleh Kabupaten Tasikmalaya:



Sumber: Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, 2019

Gambar 1.1
Anggaran dan Realisasi Belanja Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2017 dan 2018

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran belanja pada tahun 2017 dan 2018 masih belum tercapai sesuai target meskipun pada tahun 2018 realisasi anggaran naik sebesar 3,7% dari tahun 2017. Ini menunjukkan dalam penyusunan anggaran belanja daerah belum sesuai dengan peraturan yang berlaku dan diindikasikan adanya program atau kegiatan yang belum tercapai. Kendati demikian, menurut Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sudah berupaya dengan optimal dan telah berhasil melaksanakan program dan

kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga, Pelaksanaan Anggaran Berbasis kinerja di Dinas Kabupaten Tasikmalaya sudah dapat dipertanggungjawabkan, lewat laporan yang disajikan pada data tersebut.

Pengawasan melekat yang terjadi di dinas-dinas kabupaten Tasikmalaya cukup baik, melalui pengawasan dapat dilakukan penilaian apakah suatu entitas telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara hemat, efisien, dan efektif, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan yang berlaku pada tiap-tiap dinas kabupaten Tasikmalaya. Komitmen organisasi juga merupakan salah satu unsur penting yang harus dilakukan oleh tiap-tiap dinas kabupaten Tasikmalaya dalam peningkatan kinerja agar dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi. Pengawasan melekat dan komitmen organisasi harus senantiasa dapat menciptakan perubahan dan melakukan pengaruh yang lebih besar dalam peningkatan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Sehingga akan muncul keyakinan dan kepercayaan dari berbagai pihak. Dengan melihat pentingnya pengawasan melekat dan komitmen organisasi terhadap pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, maka dari itu penulis tertarik untuk mengambil judul pengawasan melekat dan komitmen organisasi terhadap pelaksanaan anggaran berbasis kinerja pada dinas kabupaten Tasikmalaya.

Seiring dengan uraian diatas penelitian ini dilakukan pada dasarnya menunjuk pada penelitian terdahulu antara lain:

1. Rosmiati Husniah Mujahidin (2009) mengenai Pengaruh Pengawasan Melekat Terhadap Disiplin Kerja Pegawai (Survey pada Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Kabupaten Bandung) Diperoleh hasil bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan sebagai variabel indeviden memiliki pengaruh terhadap disiplin kerja sebagai variabel dependen menunjukan bahwa adanya hubungan yang sangat positif dari variabel X terhadap Y dan dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan melekat memiliki pengaruh terhadap disiplin kerja pegawai. Hal ini menunjukan bahwa pengawasan melekat dan disiplin kerja pegawai yang terjadi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung berada pada kinerja baik. Hal ini berarti bahwa pengawasan melekat sudah dilakukan sesuai dengan kemampuan para pimpinan, dan para pegawai sudah menunjukan tingkat disiplin yang sudah baik.

2. Eva Rahmawati (2011) mengenai Pengaruh Pengawasan Melekat terhadap *Good Governance* (Sensus pada Dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya). Hasil penelitian menunjukan pengawasan melekat berpengaruh signifikan terhadap *Good Governance*. Ada sekitar 5,2 % faktor lain yang berpengaruh terhadap *Good Governance* tidak diteliti penulis yaitu motivasi kerja, sistem akuntansi serta sistem anggaran.
3. Rudi Harto (2012) mengenai Pengaruh Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (survey pada OPD kota Tasikmalaya). Hasil penelitian menunjukan bahwa baik secara simultan maupun parsial pengawasan melekat dan pengawasan fungsional berpengaruh signifikan terhadap efektifitas keuangan daerah. Sedangkan koefisien determinasi menunjukan bahwa secara bersama-sama pengawasan

melekat dan pengawasan fungsional memberikan sumbangan terhadap efektivitas keuangan daerah sebesar 91,4 % sedangkan sisanya 8,6 % dipengaruhi faktor lain yang tidak termasuk dalam variabel yang diteliti dalam penelitian ini.

4. Nur Fitriani Hermawan (2014) mengenai Pengaruh Pengawasan Intern dan Komitmen Organisasi Terhadap Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja (sensus pada Kecamatan Kota Tasikmalaya), hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan intern dan komitmen organisasi baik secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.
5. Vida Ayu Sahara (2016) mengenai Pengaruh Komitmen Organisasi dan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja (Sensus pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya), hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasi dan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah secara simultan maupun parsial berpengaruh positif terhadap pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.
6. Ria Fitriani (2014) mengenai Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (Survey pada OPD Kota Tasikmalaya). Diperoleh hasil bahwa Komitmen Organisasi berpengaruh signifikan terhadap implementasi anggaran berbasis kinerja.
7. Risky Rizkiana Sumarli (2012) mengenai Pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Sensus pada Dinas-Dinas Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya), hasil penelitian

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara implementasi anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja organisasi daerah.

8. Rahayu Oktarina (2016) mengenai Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektifitas Belanja Operasional (Survey pada dinas daerah kota Tasikmalaya), Diperoleh hasil bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas belanja operasional di dinas daerah kota Tasikmalaya.
9. Venni Avionita (2013) mengenai Pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur Instansi Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung). Diperoleh hasil bahwa implementasi anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja program peningkatan disiplin aparatur instansi pemerintah daerah.
10. Vhoni Anjela (2018) mengenai Pengaruh Pengawasan Melekat dan Komitmen Kerja terhadap Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja di Kantor Camat Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan melekat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, sedangkan komitmen kerja memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pelaksanaan anggaran berbasis kinerja di Kantor Camat Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur. Secara bersama-sama pengawasan melekat dan komitmen kerja berpengaruh terhadap pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.

Tabel 1.1
Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti

No	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Rosmiati Husniah Mujahidin (2009) “Pengaruh Pengawasan Melekat Terhadap Disiplin Kinerja Pegawai dikantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung”	Variabel penelitian: Pengawasan Melekat	Variabel penelitian : Disiplin Kerja Pegawai Tempat Penelitian	Hasil Penelitian Menunjukkan pengawasan melekat berpengaruh terhadap disiplin kerja	Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran
2.	Eva Rahmawati (2011) “Pengaruh Pengawasan Melekat terhadap <i>Good Governance</i> Pemerintah Daerah di Pemerintah Kota Tasikmalaya”	Variabel Penelitian: Pengawasan Melekat	Variabel Penelitian: Good Governance Tempat penelitian	Hasil Penelitian Menunjukkan pengawasan melekat berpengaruh terhadap <i>Good Governance</i>	Jurnal Akuntansi Volume 10, Nomor 1 Januari – Juni 2011 ISSN: 2685-9246
3.	Rudi Harto (2012) “Pengaruh Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah”	Variabel Penelitian: Pengawasan Melekat	Variabel Penelitian: Pengawasan Fungsional terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Hasil Penelitian Menunjukkan pengawasan melekat secara parsial berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah	Jurnal Akuntansi Volume 11, Nomor 1 Januari – Juni 2012 ISSN: 2685-9246
4.	Nur Fitriani Hermawan (2014) “Pengaruh Pengawasan Intern dan Komitmen Organisasi Terhadap Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja sensus pada Kecamatan Kota Tasikmalaya”	Variabel Penelitian: Komitmen Organisasi Terhadap Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja	Variabel Penelitian: Pengaruh Pengawasan Intern	Hasil Penelitian Menunjukkan secara parsial Komitmen Organisasi berpengaruh Terhadap Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja	Jurnal Akuntansi Volume 12, Nomor 1 Januari – Juni 2014 ISSN: 2685-9246

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	Vida Ayu Sahara (2016) “Pengaruh Komitmen Organisasi dan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja sensus pada dinas daerah KotaTasikmalaya”	Variabel Penelitian: komitmen organisasi dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja	Variabel Penelitian: implementasi sistem pengendalian intern pemerintah	Hasil Penelitian Menunjukkan secara parsial Komitmen Organisasi berpengaruh Terhadap Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja	Repository Widyatama
6.	Ria Fitriani (2014) “Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Survey pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintahan Kota Tasikmalaya	Variabel Penelitian: Komitmen Organisasi dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja	Variabel Penelitian: Pengawasan Melekat	Hasil Penelitian Menunjukkan secara parsial Komitmen Organisasi berpengaruh Terhadap Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja	Jurnal Akuntansi Volume 12, Nomor 1 Januari – Juni 2014 ISSN: 2685-9246
7.	Risky Rizkiana Sumarli (2012) “Pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)”	Variabel Penelitian: Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja	Variabel Penelitian: Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Hasil Penelitian Menunjukkan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh Terhadap Kinerja Organisasi	Jurnal Akuntansi Volume 11, Nomor 1 Januari – Juni 2012 ISSN: 2685-9246
8.	Rahayu Oktarina (2016), “Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektifitas Belanja Operasional survey pada dinas daerah kota Tasikmalaya”	Variabel Penelitian: Anggaran Berbasis Kinerja	Variabel Penelitian: Efektifitas Belanja Operasional	Hasil Penelitian Menunjukkan Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh Terhadap Efektifitas Belanja Operasional	Jurnal Akuntansi Volume 13, Nomor 1 Januari – Juni 2016 ISSN: 2685-9246

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9.	Venni Avionita (2013), “Pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur Instansi Pemerintah Daerah Studi Kasus pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung”	Variabel Penelitian: Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja	Variabel Penelitian: Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur Instansi Pemerintah Daerah	Hasil Penelitian Menunjukkan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh Terhadap Kinerja Program Peningkatan Disiplin	Repository Widyatama
10	Vhoni Anjela (2018) mengenai Pengaruh Pengawasan Melekat dan Komitmen Kerja terhadap Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja di Kantor Camat Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur	Variabel Penelitian: Pengawasan Melekat, Komitmen Organisasi dan Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja	Variabel Penelitian: Objek Penelitian di Kantor Camat Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur	Hasil Penelitian Menunjukkan pengawasan melekat berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, sedangkan komitmen kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Secara bersama-sama pengawasan melekat dan komitmen kerja signifikan berpengaruh terhadap pelaksanaan anggaran berbasis kinerja	eJournal Pemerintahan Integratif, 2018, 6 (2): 161-170 ISSN 2337-8670
Nur Anis Fadilah (2020) “Pengaruh Pengawasan Melekat dan Komitmen Organisasi Terhadap Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja Survey pada Dinas Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya					

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang disajikan dalam usulan penelitian mengenai **“Pengaruh Pengawasan Melekat Dan Komitmen Organisasi Terhadap Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja (Survey pada Dinas – Dinas di Kabupaten Tasikmalaya”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan melekat, komitmen organisasi, dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja di dinas–dinas Kabupaten Tasikmalaya
2. Bagaimana hubungan pengawasan melekat dan komitmen organisasi pada dinas - dinas Kabupaten Tasikmalaya
3. Bagaimana pengaruh pengawasan melekat dan komitmen organisasi terhadap pelaksanaan anggaran berbasis kinerja baik secara parsial maupun simultan pada dinas–dinas Kabupaten Tasikmalaya

1.3 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah didefinisikan diatas yang merupakan dasar pembahasan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan melekat, komitmen organisasi, dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja di dinas–dinas Kabupaten Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui hubungan pengawasan melekat dan komitmen organisasi pada dinas–dinas Kabupaten Tasikmalaya.

3. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan melekat dan komitmen organisasi terhadap pelaksanaan anggaran berbasis kinerja baik secara parsial maupun simultan pada dinas-dinas Kabupaten Tasikmalaya.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Dari tujuan yang telah diuraikan di atas, kegunaan yang diharapkan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran mengenai pengaruh pengawasan melekat dan komitmen organisasi terhadap pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan:

- a. Bagi penulis, memperdalam pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran berbasis kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- b. Bagi pembaca, memberikan informasi mengenai pengawasan melekat dan komitmen organisasi sebagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran berbasis kinerja serta bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
- c. Bagi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, semoga dapat dijadikan bahan untuk meresolusi perencanaan, proses, sampai evaluasi kinerja sebagai usaha dalam meningkatkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

- d. Bagi *stakeholders* pemerintah daerah, semoga dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam meningkatkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah kaitannya dengan pengawasan melekat dan komitmen organisasi.

1.5 Tempat dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan, dalam hal ini penulis akan mengadakan penelitian pada 14 Dinas atau Satuan Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan selama 16 bulan, dimulai pada bulan Juni 2019 sampai dengan September 2020 dengan jadwal penelitian terlampir (Lampiran 1).